

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 703 TLP/FAX. (0266) 226088 Sukabumi - 43169
Email : disnakertranskabsmi@yahoo.co



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban implementasi dari Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan rencana kerja tahun 2018.

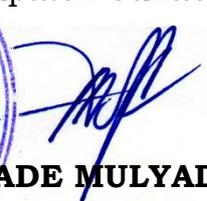
Laporan Kinerja (LKJ) merupakan Akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi selama tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi atau dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 31 Desember 2018

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi,




Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630202 198608 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan.....	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.4. Landasan Hukum	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	11
II.2. Perjanjian Kinerja	19
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2018	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
III.2. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	51
IV.2. Rencana Tindak lanjut.....	52
BAB V LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah bidang Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian didasarkan atas kebutuhan yang memiliki fungsi : evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan Bidang Transmigrasi kelompok jabatan fungsional di lingkungan Disnakertrans.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber



daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Draft Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :



1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah :



I.3.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

I.3.2. Fungsi

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
4. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Transmigrasi, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
5. Penerbitan izin / Rekomendasi teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
7. Pembinaan Administrasi di lingkungan Dinas;
8. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan public dilingkungan dinas;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



I.3.3 Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai aspek strategis dalam hal pembangunan ketenagakerjaan yang lokasinya tidak jauh dari ibukota Negara Republik Indonesia disamping itu juga dengan banyaknya investasi asing yang masuk seiring dengan perkembangan Kabupaten Sukabumi yang berkembang dari daerah agraris menjadi daerah industri. Dampak dari perkembangan tersebut semakin banyaknya kesempatan kerja bagi para pencari kerja, tetapi dengan adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkompetensi banyak yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadikan pencari kerja di wilayah Kabupaten Sukabumi harus siap bersaing dan berkompetisi dalam hal kompetensi dengan cara meningkatkan daya saing baik dari pendidikan dan keterampilan.

I.3.4. Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi dan Personil

Susunan Organisasi Disnakertrans, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bag Keuangan
 - c. Sub. Bag Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Seksi Pelayanan Antar Kerja Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja



4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 - a. Seksi Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - b. Seksi Syarat Kerja
5. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Seksi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pemagangan
 - b. Seksi Lembaga Latihan Swasta dan Produktivitas
6. Bidang Transmigrasi
 - a. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
 - b. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Disnakertrans sebagaimana bagan berikut :

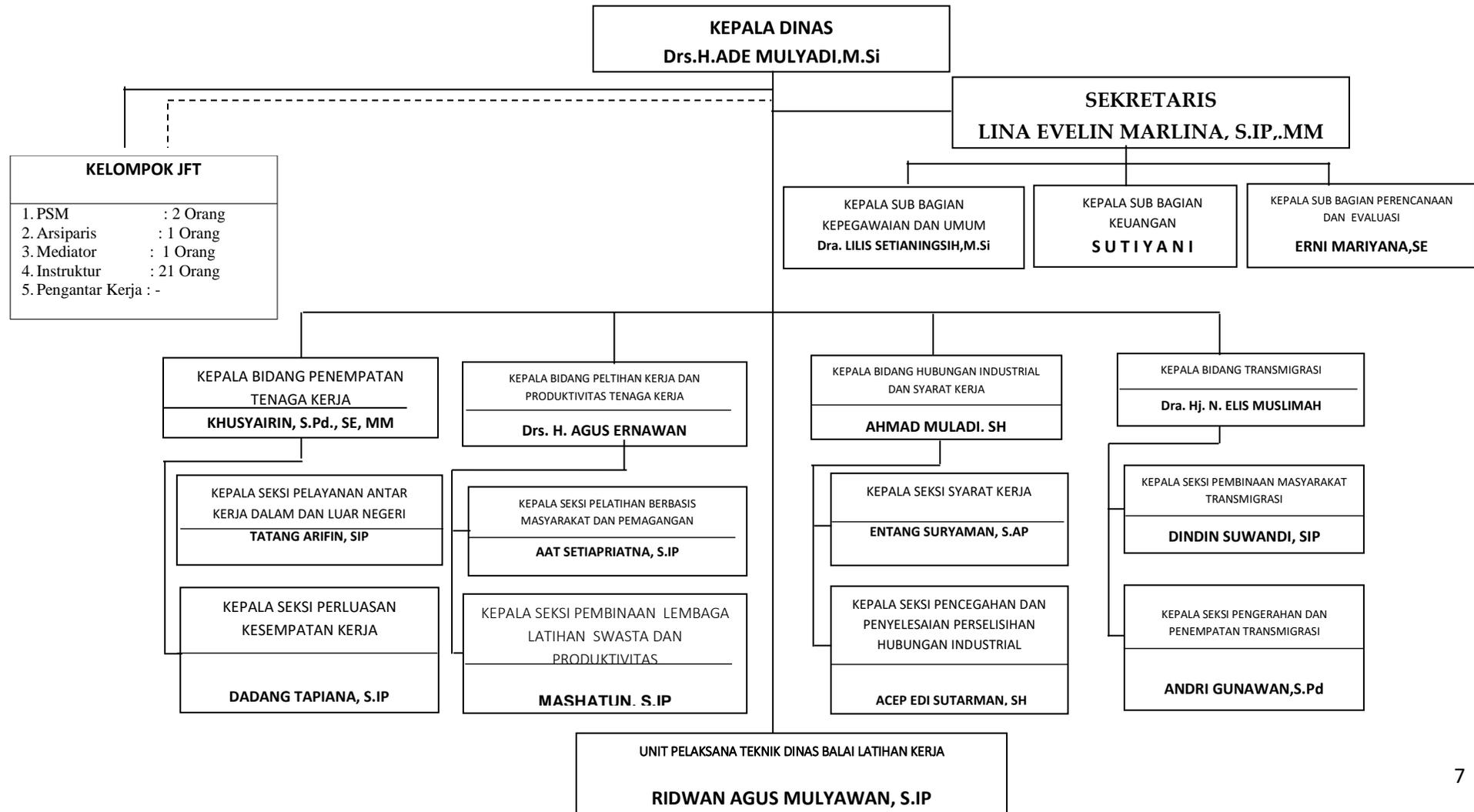


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SUKABUMI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017





3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 69 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Disnakertrans Kab.Sukabumi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DINAS	1	-	1
2.	SEKRETARIAT	5	7	12
3.	BIDANG PENEMPATAN	12	1	13
4.	BIDANG HI DAN SYAKER	7	-	7
5.	BIDANG PELATIHAN	5	2	7
6.	BIDANG TRANSMIGRASI	6	1	7
7.	UPTD BLK	16	6	22
TOTAL		52	17	69

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Kab.Sukabumi Tahun 2018

I.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2018 mengacu pada :

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan ;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;



17. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 nomor 33 tanggal 15 Oktober 2012;
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30.A Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 11 Tahun 2007 tanggal Maret 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.I. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 mencakup komponen-komponen **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021 dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja tahun 2018. Uraian dari komponen Rencana Strategis tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

Visi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Tujuan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja. Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur
2. Pencari kerja yang berkompentensi dan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
3. Berkurangnya kasus perselisihan
4. Petani miskin, buruh tani, dan masyarakat yang minat untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi
5. Lokasi transmigrasi yang layak huni dan berkembang

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana yang tertuang dalam



Tabel 2.1.

Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Eksisting (2015)	TARGET							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir	
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha	1 Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	93.55	93.64	93.75	93.84	93.94	94.05	94.15	94.15	
			2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	53.60	54.67	55.77	56.88	58.02	59.18	60.36	60.36
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			%	53.6	54.67	55.77	56.88	58.02	59.18	60.36	60.36	
	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)		Orang	140	140	140	140	140	140	140	840		
	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi		Orang	80	100	100	100	100	100	100	600		
	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat		Orang	160	200	200	200	200	200	200	1200		
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial		%	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah		Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Orang	180	20	40	40	40	40	40	40	220
	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok		Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pada tahun berjalan	%	17.3	15	16.2	16.8	17	17.5	17.5	17.50	
			Jumlah KK transmigran yang dibina	KK	55	30	30	30	30	30	30	30	180



Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri

MISI

1	2	3	4
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional	Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

TUJUAN

Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha

INDIKATOR

- | | |
|--|---|
| 1) Tingkat Pengangguran Terbuka
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 3) jumlah Transmigran yang diberangkatkan dan dibina serta translok |
|--|---|

SASARAN

- | | |
|--|---|
| 1) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja
2) Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam potensi daerah; | 3) Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok. |
|--|---|

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja
	Pencari Kerja yang ditempatkan
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)
	Jumlah pelatihan kewirausahaan
	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi
	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat
Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)
Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan
	Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini



Tabel 2.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha	1 Tingkat pengangguran terbuka 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi pencari kerja serta melindungi hak-hak pekerja	1) Rasio penduduk yang bekerja 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3) Pencari kerja yang ditempatkan 4) Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional) 5) Jumlah pelatihan kewirausahaan 6) Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	1) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja 2) Meningkatkan kompetensi pencari kerja (pelatihan institusional)	1) Perluasan Kesempatan kerja, yang diikuti dengan pengendalian rasio pekerja laki-laki serta proporsi pekerja dari penduduk sekitar perusahaan 2) Menjalin kerjasama dengan institusi penerima kerja dalam penempatan pencari kerja 3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri 4) LKS Bipartit dan Tripartit
		Masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Jumlah pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dan potensi daerah	Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah	Pelatihan masyarakat berbasis potensi daerah



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
		1) Masyarakat pedesaan yang minat untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi	Jumlah KK transmigran dan translok	Meningkatkan jumlah transmigran serta pengembangan kawasan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerjasama antar wilayah dan pengembangan kawasan transmigrasi 2) Pengerahan dan penempatan transmigran 3) Sosialisasi program transmigrasi 4) Pembinaan dan peninjauan transmigran serta translok



A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	<ol style="list-style-type: none">1. Rasio penduduk yang bekerja2. Pencari kerja yang ditempatkan3. Tingkat partisipasi angkatan kerja4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan.2. Jumlah KK transmigran yang dibina



II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sebagai berikut :



Tabel.2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	- Rasio Penduduk yang Bekerja	93,84 %
		- Pencari kerja yang ditempatkan	62,77 %
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56,88 %
		- Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	228 Orang
		- Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100 %
2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	- Jumlah masyarakat pedesaan dalam mberdayakan potensi daerah (Pelatihan Non Institusional)	280 Orang
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	- Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan	16,02 %
		- Jumlah KK transmigran yang dibina	30 KK



No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.111.286.319	
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.319.028.488	
3.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50.000.000	
4.	Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	556.264.761	
5.	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	1.039.012.000	
6.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	982.711.200	
7.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	294.517.000	
8.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	301.906.950	

A. Rencana Aksi

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun tahun 2018, maka perlu adanya rencana aksi pencapaian target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan, namun karena mengalami perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018, sehingga pencapaian target kinerja menjadi tidak optimal dalam beberapa target capaian kinerja. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan dalam table2.5.



Tabel 2.5.
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Per-Triwulan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja serta melindungi hak-hak pekerja	1. Rasio penduduk yang bekerja	93.84	%	23.46	23.46	23.46	23.46	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja						
		2. Pencari Kerja yang ditempatkan	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	Kegiatan : 1. Jobfair	Jumlah peserta jobfair	80.885.000	-	-	20 prshn	-
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	2. Pengembangan teknologi tepat guna	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	76.030.000	-	20 org	-	-
		4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	140	Orang	35	35	35	35	3. Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (DBHCHT 2018)	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	323.082.000	-	-	60 org	40 org
		5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	100	Orang	25	25	25	25	4. Perluasan kesempatan kerja (DBHCHT 2018)	Jumlah tenaga kerja sementara/penganggur sementara	170.000.000	-	88 org	-	-
		6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	200	Orang	50	50	50	50	5. Pembinaan busa kerja khusus (DBHCHT 2018)	Penyedia lapangan kerja bagi para	49.000.000	-	60 BK K	-	-
		7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100	%	25	25	25	25							



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										penganggur dan setengah penganggur					
									6. Pembinaan pelaksana tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja Indonesia swasta melalui PPTKIS	30.000.000	-	-	-	30 org
									7. Pembinaan pengembangan hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan (Dewan pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, mayday) (DBHCHT 2018)	Kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	310.015.000	20 org	60 org	50 org	150 org
									Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
									Kegiatan : 1. Penyelesaian kasus hubungan industrial (DBHCHT 2018)	Terselesaikannya kasus hubungan industrial	77.017.000	100 prshn	-	-	-
									2. Pelayanan pemulangan TKI (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pelayanan	40.000.000	1 Org	2 Org	1 Org	1 Org



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										pemulangan TKI yang bermasalah					
									3.Pembinaan dan evaluasi serikat pekerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya etos kerja yang lebih baik diperusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif	87.500.000	-	100 Org	-	100 Org
									4.Pembinaan tenaga kerja asing di perusahaan (DBHCHT 2018)	Meningkatnya ketertiban administrasi tenaga kerja asing diperusahaan yang ada diwilayah kab. Sukabumi	20.000.000	-	30 org	15 org	262 org
									5.Rapat koordinasi hubungan industrial dan syarat kerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya koordinasi urusan ketenagakerjaan yang kondusif diwilayah kab.sukabumi	70.000.000	-	256 org	-	-
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam								Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
									Kegiatan : 1.Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	Jumlah masyarakat yang dilatih	355.193.000	-	120 org	-	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengelolaan potensi daerah	1. Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Instiusional)	40	Orang	10	10	10	10	2. Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	328.908.000		100 org	-	-
									3. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja (LPK)	Jumlah pembinaan LPK	198.610.200	-	-	-	55 LPK
									4. Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (PIK Sektoral) (DBHCHT 2018)	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	100.000.000	-	-	20 org	-
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbina transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina	16.8 30	%/thn KK	4.2 7	4.2 7	4.2 9	4.2 7	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						
									Kegiatan : 1. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikunjungi diluar pulau jawa	87.689.000	1 lokasi	1 lokasi	-	-
									2. Pembinaan masyarakat transmigrasi lokal	Jumlah masyarakat translok yang dibina	51.780.000	-	2 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi
									3. Pengerahan dan penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang akan dikirim ke luar pulau jawa	53.402.950	-	-	-	10 KK
									4. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam	Lokasi penjajagan	72.710.000	1 MoU	-	-	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									rangka pengembangan Kawasan transmigrasi	daerah penerima transmigrasi					
									5.Sosialisasi transmigrasi	Materi program ketransmigrasian yang disampaikan kepada masyarakat	36.325.000	-	50 org	50 org	50 org



II.3. Rencana Anggaran Tahun 2018

Tabel. 2.6.
Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi

Misi : Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industry Yang Berwawasan Lingkungan							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan usaha	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	1. Rasio penduduk yang bekerja	%	93.84	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Jobfair	80.885.000
		2. Pencari Kerja yang ditempatkan	%	56.88		Pengembangan Teknologi Tepat Guna	76.030.000
						Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (DBHCHT 2018)	323.082.000
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	56.88		Perluasan Kesempatan Kerja (DBHCHT 2018)	170.000.000
						Pembinaan Bursa Kerja Khusus	49.000.000
						Pembinaan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (DBHCHT 2018)	30.000.000
		4. Jumlah pencari				Pembinaan Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengembangan Kelembagaan (Dewan Pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, Mayday) (DBHCHT 2018)	310.015.000



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industry Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
		kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	Orang	140	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (DBHCHT 2018)	77.017.000
						Pelayanan Pemulangan TKI (DBHCHT 2018)	40.000.000
						Pembinaan dan Evaluasi Serikat Kerja (DBHCHT 2018)	87.500.000
		5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi				Pembinaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan (DBHCHT 2018)	20.000.000
		6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	Orang	100		Rapat Koordinasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (DBHCHT 2018)	70.000.000
		7. Persentase penyelesaian kasus hubunga	Orang	200			



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industry Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
		n industrial	%	100			
	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Orang	40	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	355.193.000
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat						328.908.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)						198.610.200	
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat (PIK Sektoral) (DBHCHT 2018)						100.000.000	



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata Dan Industry Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018				Anggaran Rp.
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	
	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	1. Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan	%/thn	16.8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	87.689.000
						Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	51.780.000
						Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi	53.402.950
		Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	72.710.000				
		Sosialisasi Transmigrasi	36.325.000				
		2. Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina		30			



Tabel. 2.7.
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	1. Rasio penduduk yang bekerja	1.039.012.000	89,46
		2. Pencari Kerja yang ditempatkan		
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	982.711.200	97,76
		5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi		
		6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat		
		7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	294.517.000	80,76
2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	982.711.200	
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	1. Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan 2. Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina	301.906.950	86,40



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1



1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

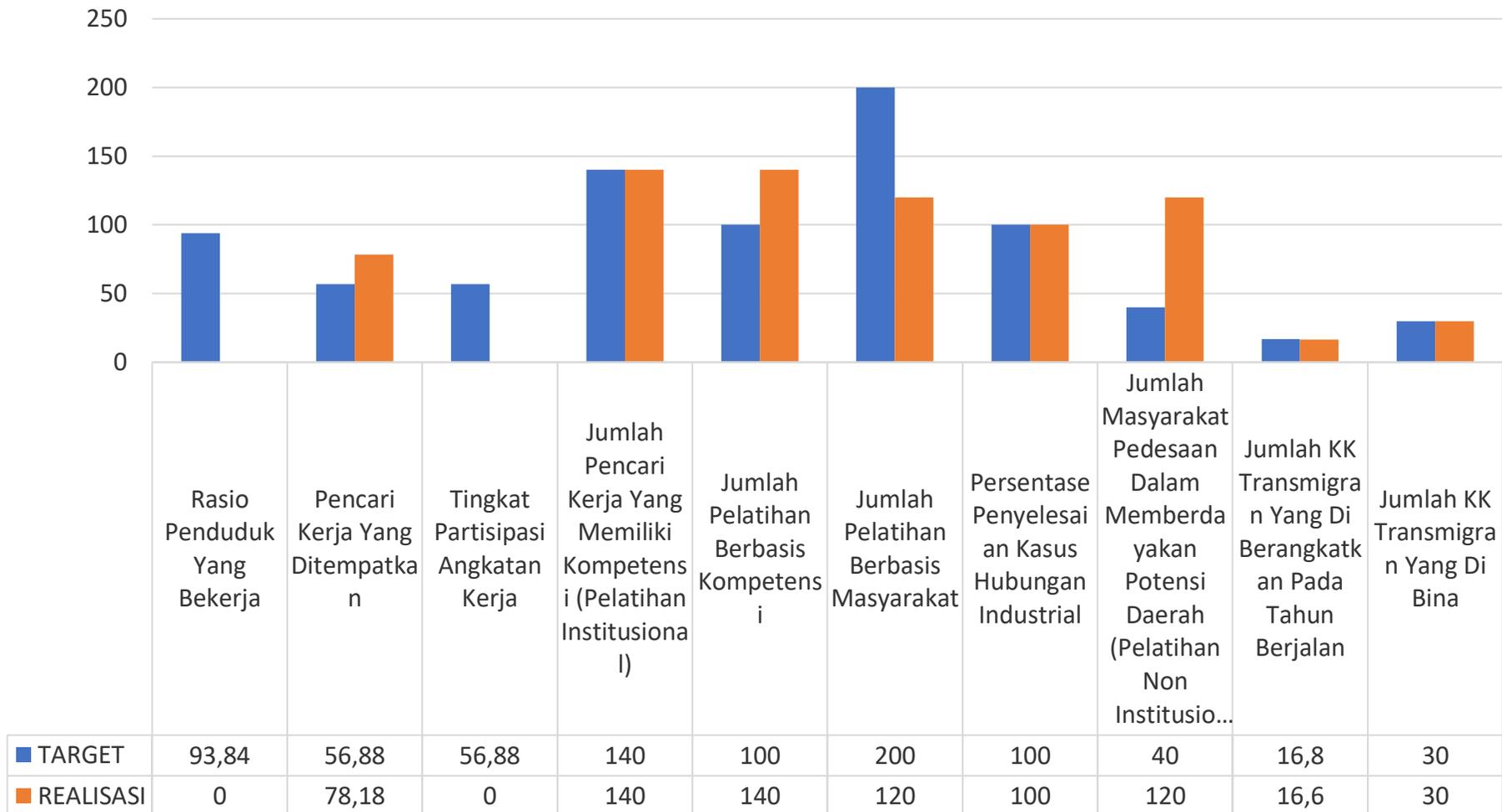
Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2018		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	93.84		
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	56.88	78.18	90.84
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	56.88		
		Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Instiusional)	Orang	140	140	100
		Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	100	140	140
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	200	120	60
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	100	100
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Instiusional)	Orang	40	120	300
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran Dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yg Diberangkatkan Pd Tahun Berjalan	%/Thn	16.8	16.6	98.80
		Jumlah KK Transmigran Yg Dibina	KK	30	30	100



CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018





2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2017 Dan Beberapa Tahun Terakhir

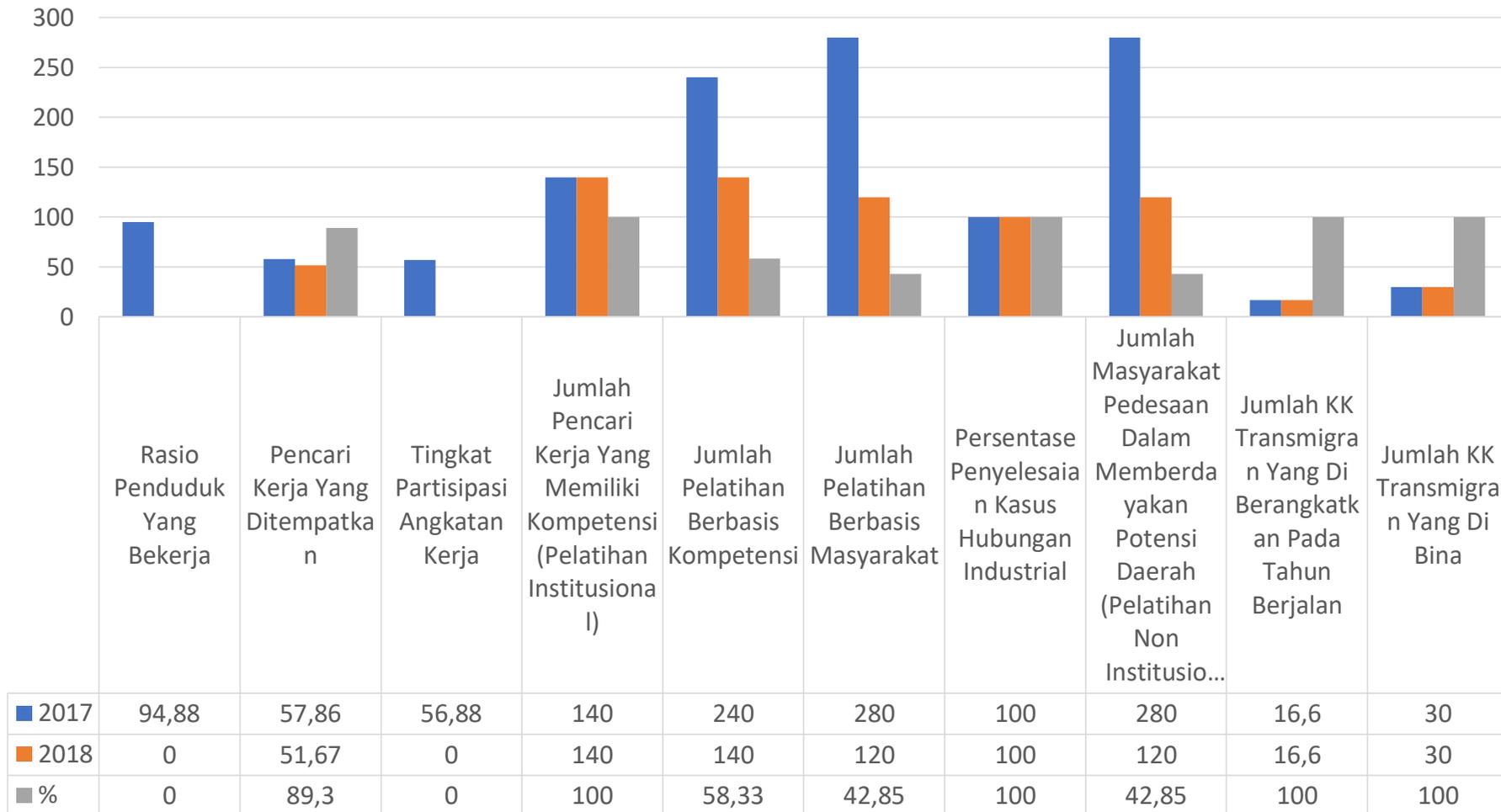
Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		%
				2017	2018	
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	94.88		
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	57.86	78.18	89.30
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	56.88		
		Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Institusional)	Orang	140	140	100
		Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240	140	58.33
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	280	120	42.85
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	100	100
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Orang	280	120	42.85
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran Dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yg Diberangkatkan Pd Tahun Berjalan	%/Thn	16.6	16.6	100
		Jumlah KK Transmigran Yg Dibina	KK	30	30	100



PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2018





3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target
Kinerja Renstra PD

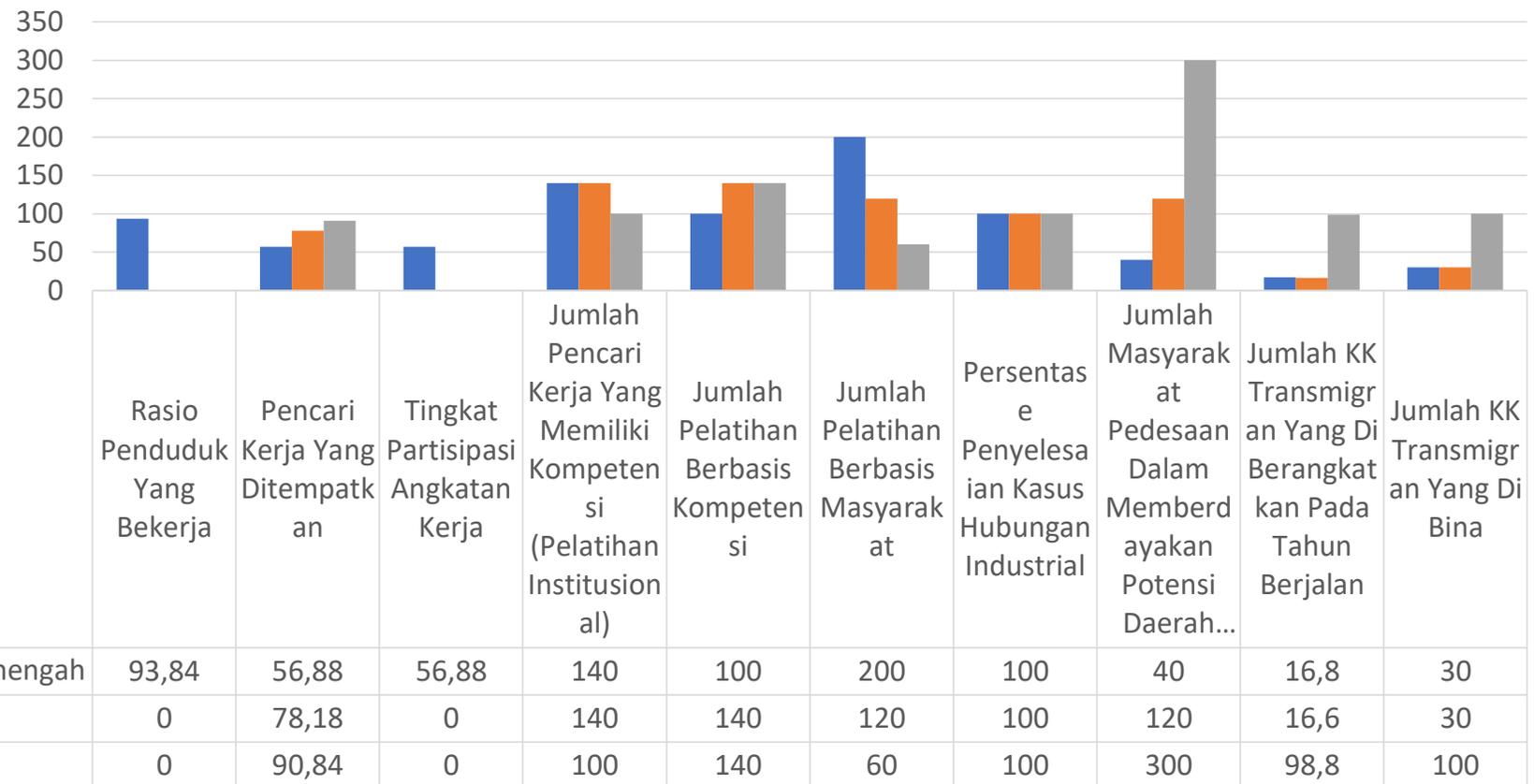
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2018	%
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	93.84 %		
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	56.88 %	78.18 %	90.84
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56.88 %		
		Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Institusional)	140 Orang	140 Orang	100
		Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Orang	140 Orang	140
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	200 Orang	120 Orang	60
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100 %	100 %	100
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	40 Orang	120 Orang	300



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2018	%
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran Dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yg Diberangkatkan Pd Tahun Berjalan	16.8 %	16.6 %	98.80
		Jumlah KK Transmigran Yg Dibina	30 KK	30 KK	100



PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET KINERJA RENSTRA PD





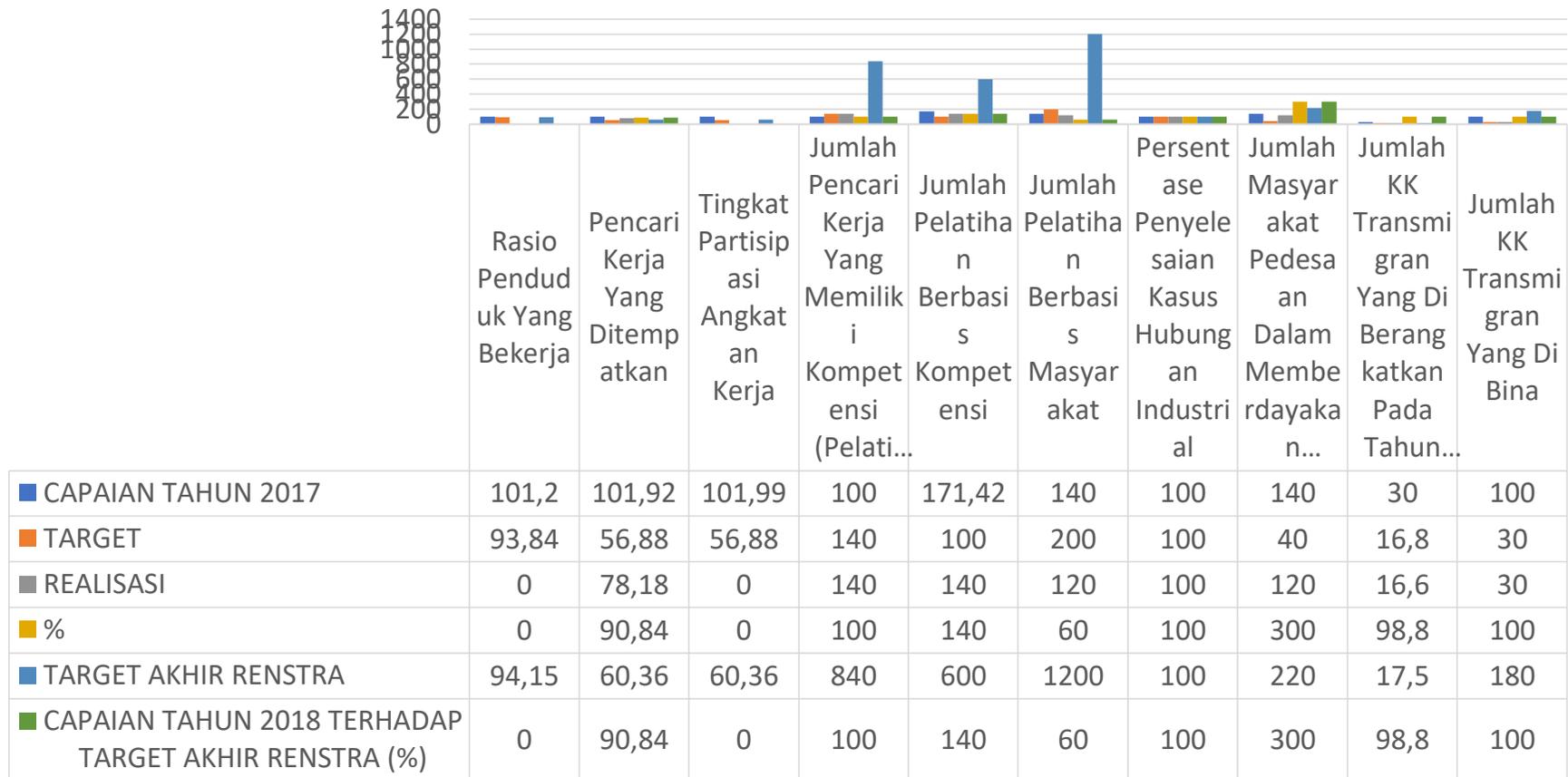
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2017)	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja	101.2 %	93.84			94.15	
		Pencari kerja yang ditempatkan	101.92 %	56.88	78.18	90.84	60.36	90.84
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	101.99 %	56.88			60.36	
		Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi (pelatihan institusional)	100 %	140	140	100	840	100
		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	171.42 %	100	140	140	600	140
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	140 %	200	120	60	1200	60
		Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100 %	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)	140 %	40	120	300	220	300
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan	30 %	16.8	16.6	98.80	17.50	98.80
		Jumlah KK transmigran yg dibina	100 %	30	30	100	180	100



Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Tahun 2018

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018





Pencapaian kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2018. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui 4 (empat) Program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2018, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang merupakan janji dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu 2 semester pada tahun anggaran 2018, target indikator sasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terdapat 3 sasaran dengan indikator kinerja.

Hasil penghitungan capaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.5.



Tabel 3.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Hanya untuk capaian kinerja $\geq 100\%$)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak hak pekerja	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	140	99.03	40.97
2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)	300	97.40	202.6

Dari data-data diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada capaian kinerja dapat diukur dalam efesiensi pengelolaan anggaran Tahun 2018. Bahwa Disnakertrans Kab. Sukabumi telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja dengan peningkatan peningkatan kompetensi pencari kerja diwilayah kabupaten sukabumi.



6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja		Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	A. Jobfair B. Pengembangan Teknologi Tepat Guna C. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri D. Perluasan Kesempatan Kerja E. Pembinaan Bursa Kerja Khusus F. Pembinaan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) G. Pembinaan Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengembangan Kelembagaan (Dewan Pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, Mayday)
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	90.84		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
		Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Institusional)	100		
Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	140	1. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 2. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat 3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 4. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat (PIK Sektoral)			



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	60		
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial 2. Pelayanan Pemulangan TKI 3. Pembinaan dan Evaluasi Serikat Kerja 4. Pembinaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan 5. Rapat Koordinasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	300	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat 2. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat (PIK Sektoral)
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran Dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yg Diberangkatkan Pd Tahun Berjalan	98.80	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 2. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal 3. Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi 4. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5. Sosialisasi Transmigrasi
		Jumlah KK Transmigran Yg Dibina	100		



III.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran tahun 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran

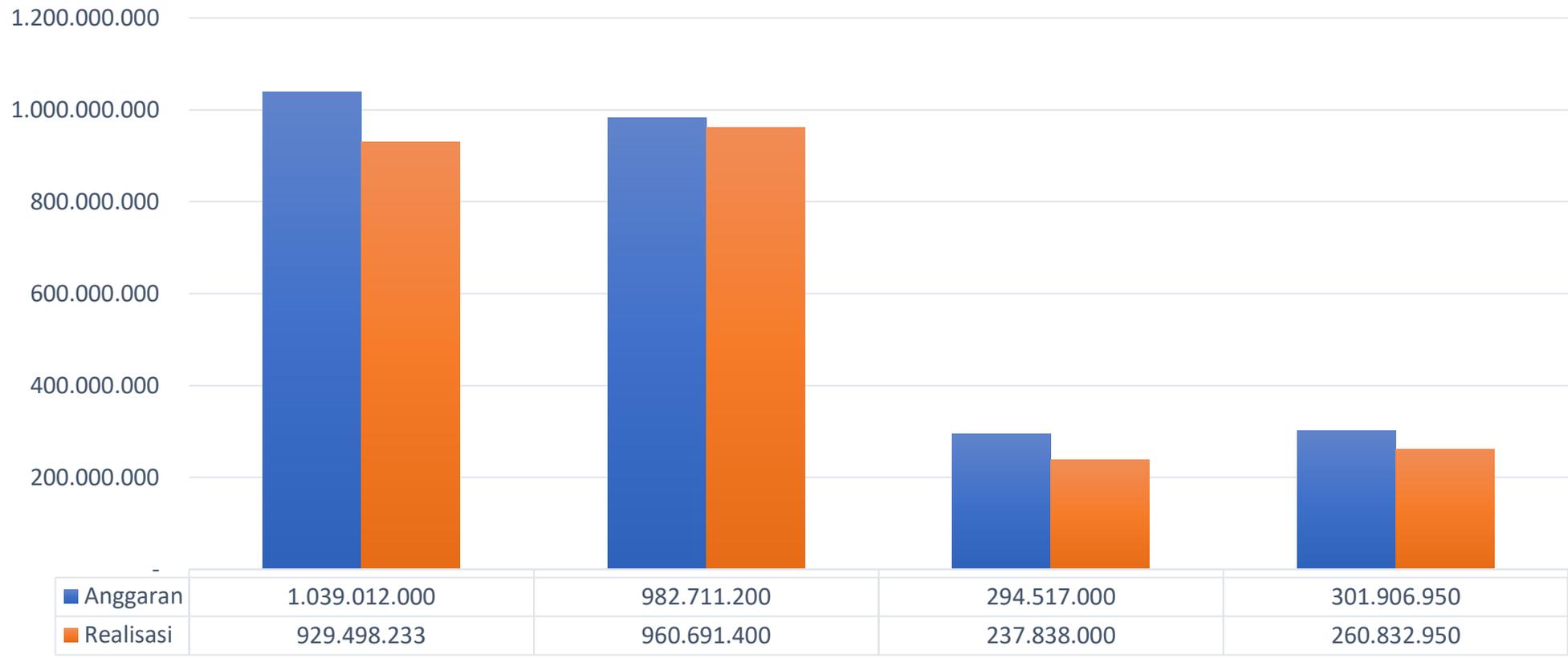
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1.039.012.000	929.498.233	89,46
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan				
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				
		Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Instiusional)	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	982.711.200	960.691.400	97,76
		Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi				
		Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat				
Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	294.517.000	237.838.000	80,76		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Instiusional)	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	982.711.200	960.691.400	97,76
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran Dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan Pada Tahun Berjalan	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	301.906.950	260.832.950	86,40
		Jumlah KK Transmigran Yang Dibina				



REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN





Berdasarkan tampilan data Realisasi kinerja dan anggaran pada table 3.7, penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi cukup baik dengan rata-rata angka persentase 90,42 % untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan, Realisasi penyerapan anggaran terendah ada pada program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan angka 80,76 % , namun pencapaian program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan pada table 3.4 ataupun pada table 3.6, angka capaian programnya dengan indikator kinerjanya Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial dengan sasaran strategis Meningkatkan Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja, mencapai angka 100%, ini menandakan efisiensi anggaran cukup baik.

Adapun untuk penyerapan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan angka presentase realisasi anggaran mencapai 97,76%, Salah satu program dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Institusional) dengan sasaran strategisnya adalah Meningkatkan Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak Hak Pekerja, selain itu program ini juga menjadi sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah Masyarakat Pedesaan Dalam Memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional). Dengan pencapai tersebut membuktikan bahwa Pelatihan kerja berbasis kompetensi sangat diminati oleh para pencari kerja ataupun masyarakat pedesaan yang ingin berwirausaha mandiri.

Secara umum pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah baik, dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap Target Renstra Kabupaten Sukabumi, baik terhadap target Renstra tahun berjalan ataupun Target Renstra untuk tahun 2016-2021.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

a. KESIMPULAN

A.1. Keberhasilan

Secara keseluruhan Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan capaian kinerja dinilai sangat baik dan meningkat, diantaranya :

1. Adanya layanan terpadu satu pintu (LTSP) yang bertujuan untuk melayani pelayanan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah melakukan MoU dengan Instansi terkait, antara lain :

1. POLRES KOTA/KAB
2. BNP2TKI
3. P4TKI
4. IMIGRASI
5. APWI
6. RSUD SEKARWANGI

A.2. Kendala dan Hambatan

4. Masih rendahnya SDM Tenaga Kerja diperusahaan wilayah Kabupaten Sukabumi dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan formal;
5. Masih Kurangnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan calon TKI ke Luar Negeri;
6. Masih kurangnya animo masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti program transmigrasi ke luar pulau Jawa;



7. Masih rendahnya tingkat kompetensi pencari kerja untuk masuk dunia Usaha dan Kerja.

b. RENCANA TINDAK LANJUT

Strategi Penyelesaian Masalah

1. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif., efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan Koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan diperlukan etos kerja yang tinggi.
3. Dalam menyalurkan tingginya animo masyarakat bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, dilakukan kegiatan menjalin kerja sama dengan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penempatan/penerima transmigrasi.
4. Meningkatnya efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
5. Untuk mengantisipasi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).

Demikianlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Disnakertrans Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.

Sukabumi, 31 Desember 2018

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630202 198608 1 001



LAMPIRAN







PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(DISNAKERTRANS)

JL. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Telp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi 43169
e-mail : disnakertrans_kabsmi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR :

TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
 11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 79 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI.**
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melporkan data kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630202 198608 1 0001

Lampiran : Keputusan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten
Sukabumi
Nomor :
Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
TENAGA KERJ DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi
3.	Sekretaris	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi
4.	Anggota	a. Para Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi b. Para Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi c. 2 (dua) orang Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada bagian perencanaan dan evaluasi

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 198608 1 0001

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/183/2016).
28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk:
1. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 2. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 4. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
 5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016 – 2021).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal : Januari 2018

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630202 198608 1 001

NOMOR :
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
DISNAKERTRANS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DISNAKERTRANS**

1. Nama Organisasi : DISNAKERTRANS
2. Tugas : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Fungsi :
 - d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - a. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Transmigrasi: kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas
 1. penerbitan ijin/rekomendasi teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perijinan yang diterbitkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
 3. pembinaan administrasi dilingkungan dinas;

4. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
 1. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - ii. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	1.Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja	93,84 %
		2. Pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang ditempatkan -----X100% Pencari kerja yang terdaftar	56,88 %
		3.Tingkat partisipasi angkatan kerja	jumlah angkatan kerja -----X 100% jumlah tenaga kerja	56,88 %
		4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	Tenaga kerja yang dilatih ----- X100% Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	140 Orang
		5. Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tenaga kerja yang dilatih ----- X100% Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	100 Orang
		6. Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga kerja yang dilatih ----- X100% Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	200 Orang
		7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kasus yang diselesaikan dengan PB -----X100% Kasus yang dicatatkan	100 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Potensi Daerah	1. Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Tenaga kerja yang dilatih ----- X100% Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	40 Orang

3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	j. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan	Jumlah KK transmigran yang terdaftar -----X100% Jumlah yang diberangkatkan	16,8 %
		k. Jumlah KK transmigran yang dibina	Jumlah KK transmigrans -----X100% Jumlah KK yang dibina	30 KK

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630202 198608 1 001

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET		
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja serta melindungi hak-hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja	93,84 %	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Jobfair	Jumlah peserta jobfair	Perusahaan	20		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62,77 %		Pengembangan teknologi tepat guna	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	Org	20		
	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	56,88 %		Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (DBHCHT 2018)	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	org	60		
	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	180 org		Perluasan kesempatan kerja (DBHCHT 2018)	Jumlah tenaga kerja sementara/penganggur sementara	org	88		
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	160 org		Pembinaan busa kerja khusus (DBHCHT 2018)	Penyedia lapangan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	BKK	60		
	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	280 org		Pembinaan pelaksana tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja Indonesia swasta melalui PPTKIS	org	30		
	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	240 org		Pembinaan pengembangan hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan (Dewan pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, mayday) (DBHCHT 2018)	Kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	org	130		
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100 %		Perindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Penyelesaian kasus hubungan industrial (DBHCHT 2018)	Terselesaikannya kasus hubungan industrial	Perusahaan	100	
					Pelayanan pemulangan TKI (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah	org	5	
					Pembinaan dan evaluasi serikat pekerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya etos kerja yang lebih baik diperusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif	org	100	
					Pembinaan tenaga kerja asing di perusahaan (DBHCHT 2018)	Meningkatnya ketertiban administrasi tenaga kerja asing diperusahaan yang ada di wilayah kab. Sukabumi	org	307	
					Rapat koordinasi hubungan industrial dan syarat kerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya koordinasi urusan ketenagakerjaan yang kondusif	org	150	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	KET
					diwilayah kab.sukabumi			
Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam mengelola potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)	280 org	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	Jumlah masyarakat yang dilatih	org	40	
				Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	org	20	
				Pembinaan Lembaga pelatihan kerja (LPK)	Jumlah pembinaan LPK	LPK	55	
				Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (PIK Sektoral) (DBHCHT 2018)	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	org	20	
Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan Jumlah KK transmigran dan translok yang dibina	16,02 %	Pengembangan wilayah transmigrasi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikunjungi diluar pulau jawa	Lokasi	2	
		30 KK		Pembinaan masyarakat transmigrasi local	Jumlah masyarakat translok yang dibina	lokasi	5	
				Pengerahan dan penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang akan dikirim ke luar pulau jawa	KK	10	
				Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi	Lokasi penjajagan daerah penerima transmigrasi	MoU	1	
				Sosialisasi transmigrasi	Materi program ketransmigrasian yang disampaikan kepada masyarakat	org	150	

Tabel 2.1

Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Per-Triwulan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan				
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja serta melindungi hak-hak pekerja	a. Rasio penduduk yang bekerja	93.84	%	23.46	23.46	23.46	23.46	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja							
		b. Pencari Kerja yang ditempatkan	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	Kegiatan : 8. Jobfair	Jumlah peserta jobfair	80.885.000	-	-	20 prshn	-	
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	9. Pengembangan teknologi tepat guna	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	76.030.000	-	20 org	-	-	
		d. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	140	Orang	35	35	35	35	10. Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (DBHCHT 2018)	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	323.082.000	-	-	60 org	40 org	
		e. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	100	Orang	25	25	25	25	11. Perluasan kesempatan kerja (DBHCHT 2018)	Jumlah tenaga kerja sementara/penganggur sementara	170.000.000	-	88 org	-	-	
		f. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	200	Orang	50	50	50	50	12. Pembinaan busa kerja khusus (DBHCHT 2018)	Penyedia lapangan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	49.000.000	-	60 BKK	-	-	
		g. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100	%	25	25	25	25	13. Pembinaan pelaksana tenaga kerja Indonesia swasta	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja Indonesia swasta melalui PPTKIS	30.000.000	-	-	-	30 org	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									(PPTKIS) (DBHCHT 2018)						
									14. Pembinaan pengembangan hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan (Dewan pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, mayday) (DBHCHT 2018)	Kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	310.015.000	20 org	60 org	50 org	150 org
									Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
									Kegiatan : 1. Penyelesaian kasus hubungan industrial (DBHCHT 2018)	Terselesaikannya kasus hubungan industrial	77.017.000	100 prshn	-	-	-
									2. Pelayanan pemulangan TKI (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah	40.000.000	1 Org	2 Org	1 Org	1 Org
									3. Pembinaan dan evaluasi serikat pekerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya etos kerja yang lebih baik diperusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif	87.500.000	-	100 Org	-	100 Org
									4. Pembinaan tenaga kerja asing di perusahaan (DBHCHT 2018)	Meningkatnya ketertiban administrasi tenaga kerja asing diperusahaan yang ada	20.000.000	-	30 org	15 org	262 org

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										diwilayah kab. Sukabumi					
									5.Rapat koordinasi hubungan industrial dan syarat kerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya koordinasi urusan ketenagakerjaan yang kondusif diwilayah kab.sukabumi	70.000.000	-	256 org	-	-
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	1. Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	40	Orang	10	10	10	10	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
									Kegiatan :						
									1.Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	Jumlah masyarakat yang dilatih	355.193.000	-	120 org	-	-
									2.Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	328.908.000	-	100 org	-	-
									3.Pembinaan Lembaga pelatihan kerja (LPK)	Jumlah pembinaan LPK	198.610.200	-	-	-	55 LPK
									4.Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (PIK Sektoral) (DBHCHT 2018)	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	100.000.000	-	-	20 org	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Jadwal & Target Kegiatan			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina	16.8 30	%/thn KK	4.2 7	4.2 7	4.2 9	4.2 7	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						
									Kegiatan : 1. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikunjungi diluar pulau jawa	87.689.000	1 lokasi	1 lokasi	-	-
									2. Pembinaan masyarakat transmigrasi lokal	Jumlah masyarakat translok yang dibina	51.780.000	-	2 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi
									3. Pengerahan dan penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang akan dikirim ke luar pulau jawa	53.402.950	-	-	-	10 KK
									4. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi	Lokasi penjajagan daerah penerima transmigrasi	72.710.000	1 MoU	-	-	-
									5. Sosialisasi transmigrasi	Materi program ketransmigrasian yang disampaikan kepada masyarakat	36.325.000	-	50 org	50 org	50 org

Cascading Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

RPJMD



Sasaran : Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha



Sasaran :

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja serta melindungi hak-hak pekerja
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam potensi daerah
3. Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok

Indikator Sasaran :

1. Rasio penduduk yang bekerja
2. Pencari kerja yang ditempatkan
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja
4. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi
5. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat
6. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
7. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan
8. Jumlah KK transmigran dan translok yang dibina



DISNAKERTRANS

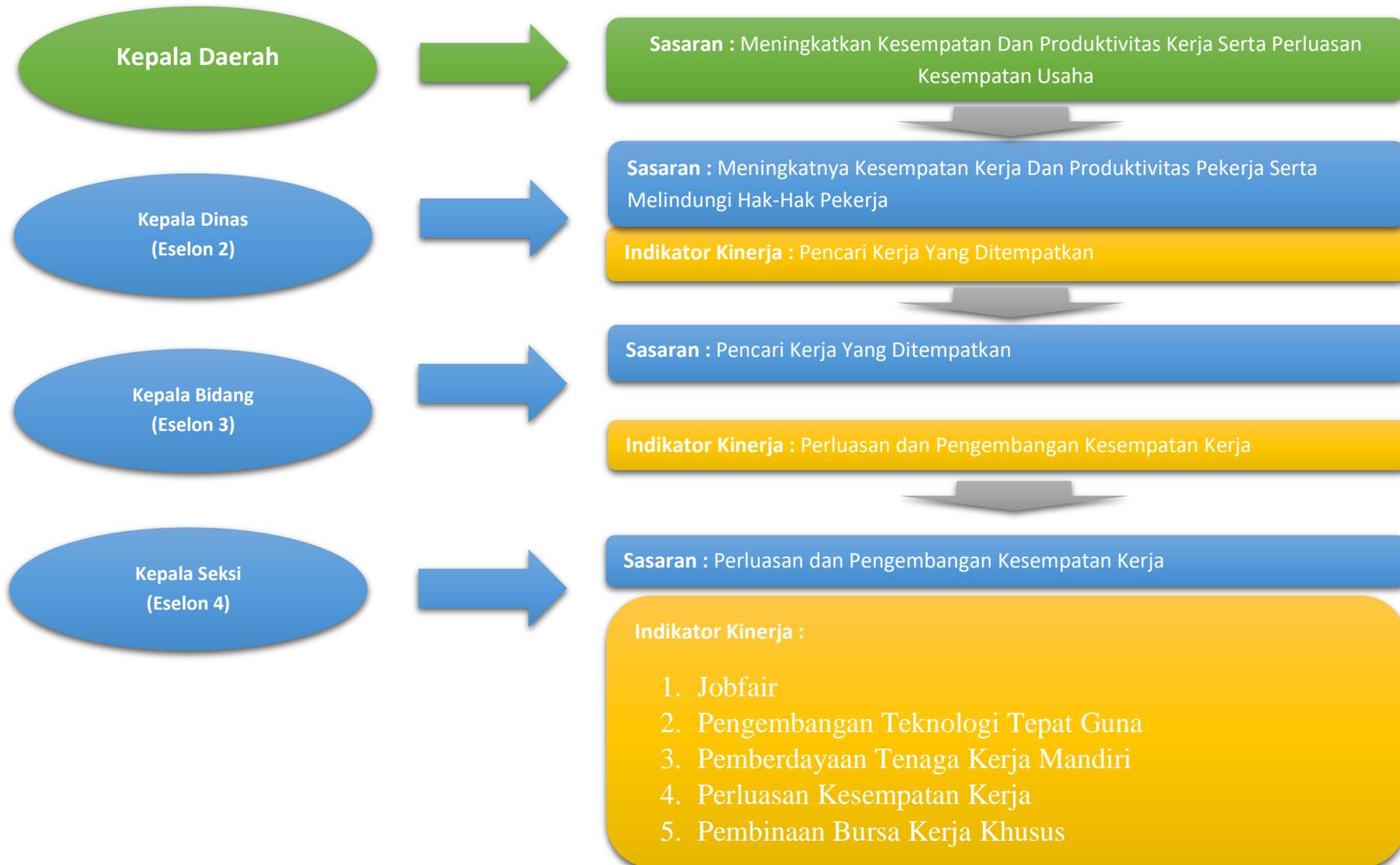


PROGRAM

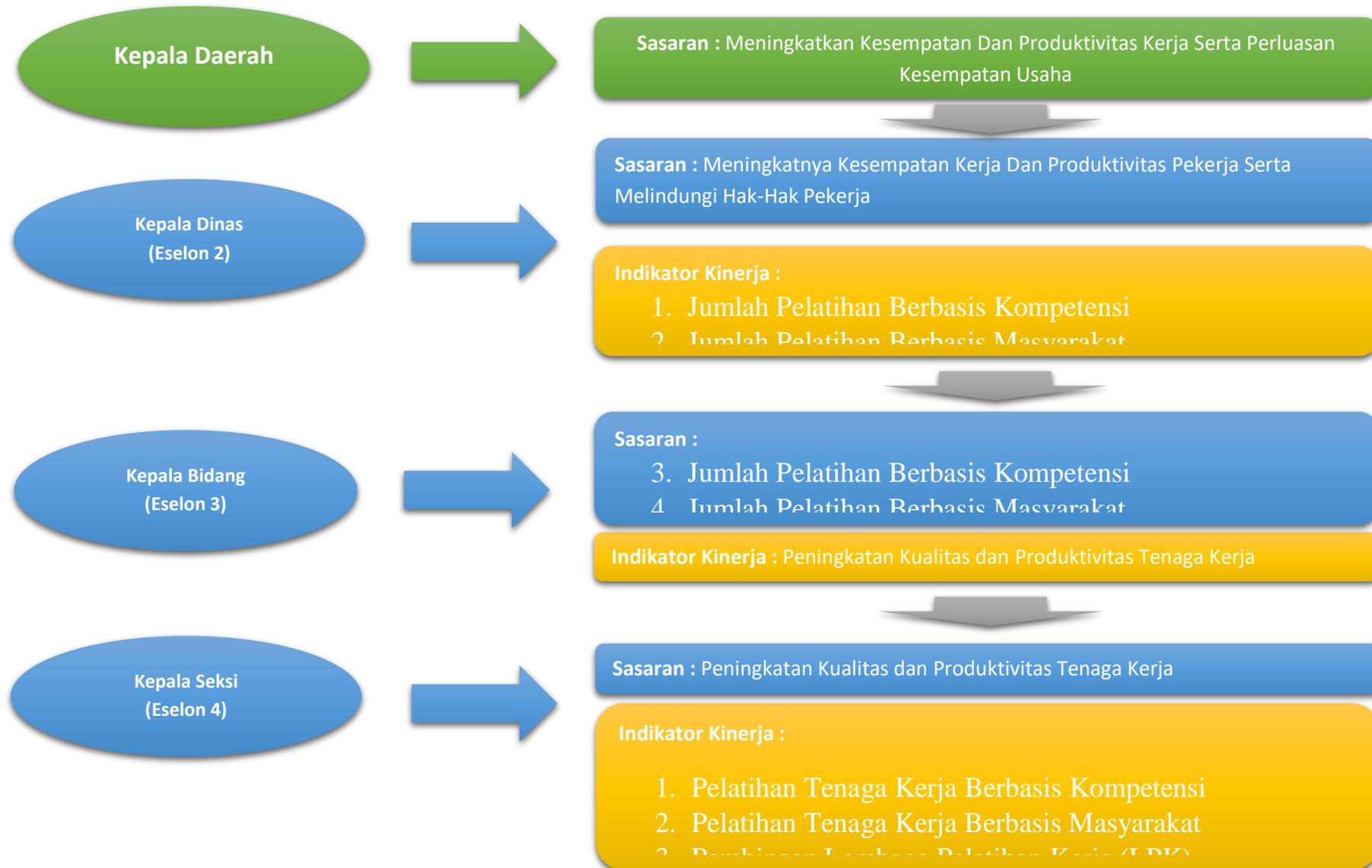


1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

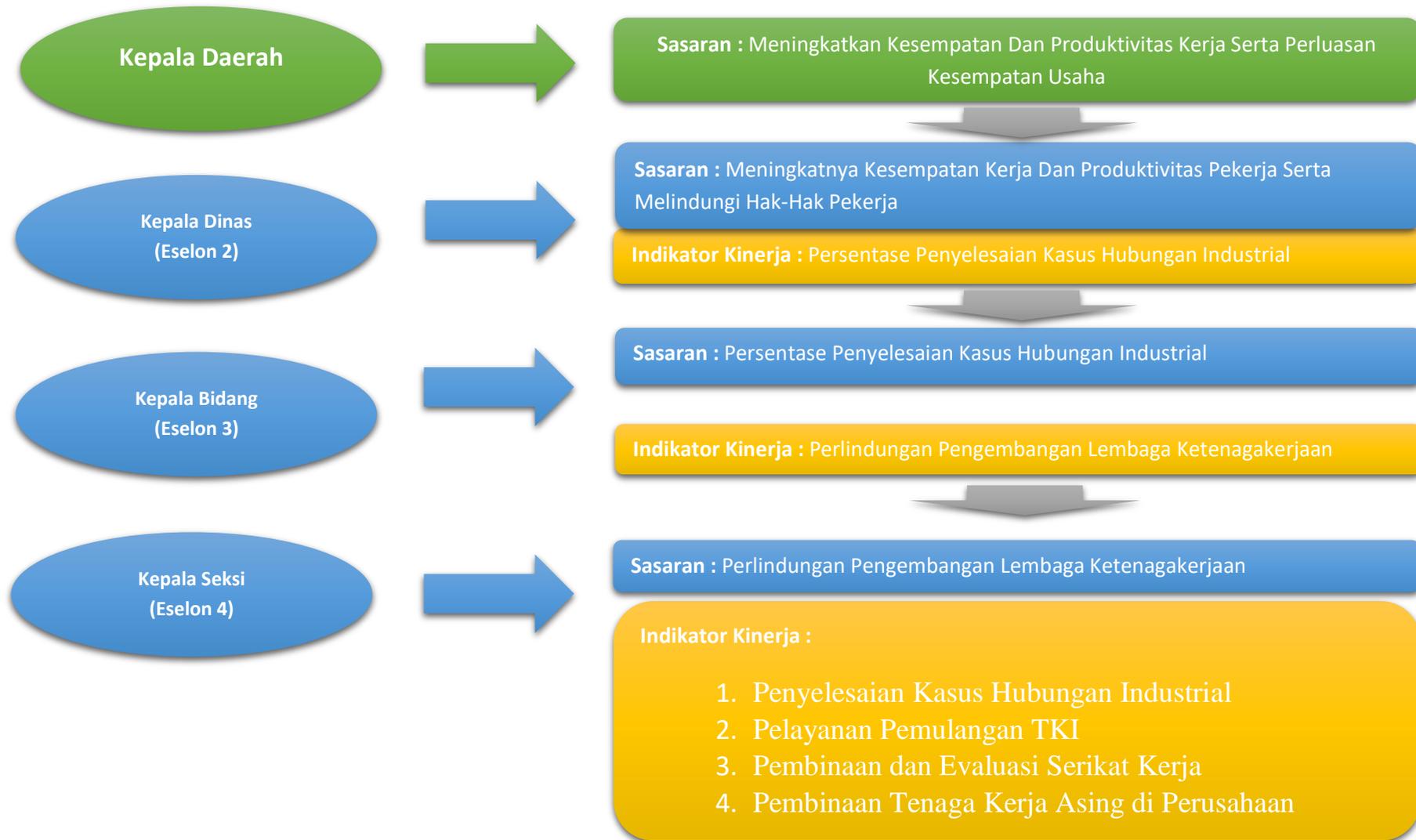
Cascading Bidang Penempatan Tenaga Kerja



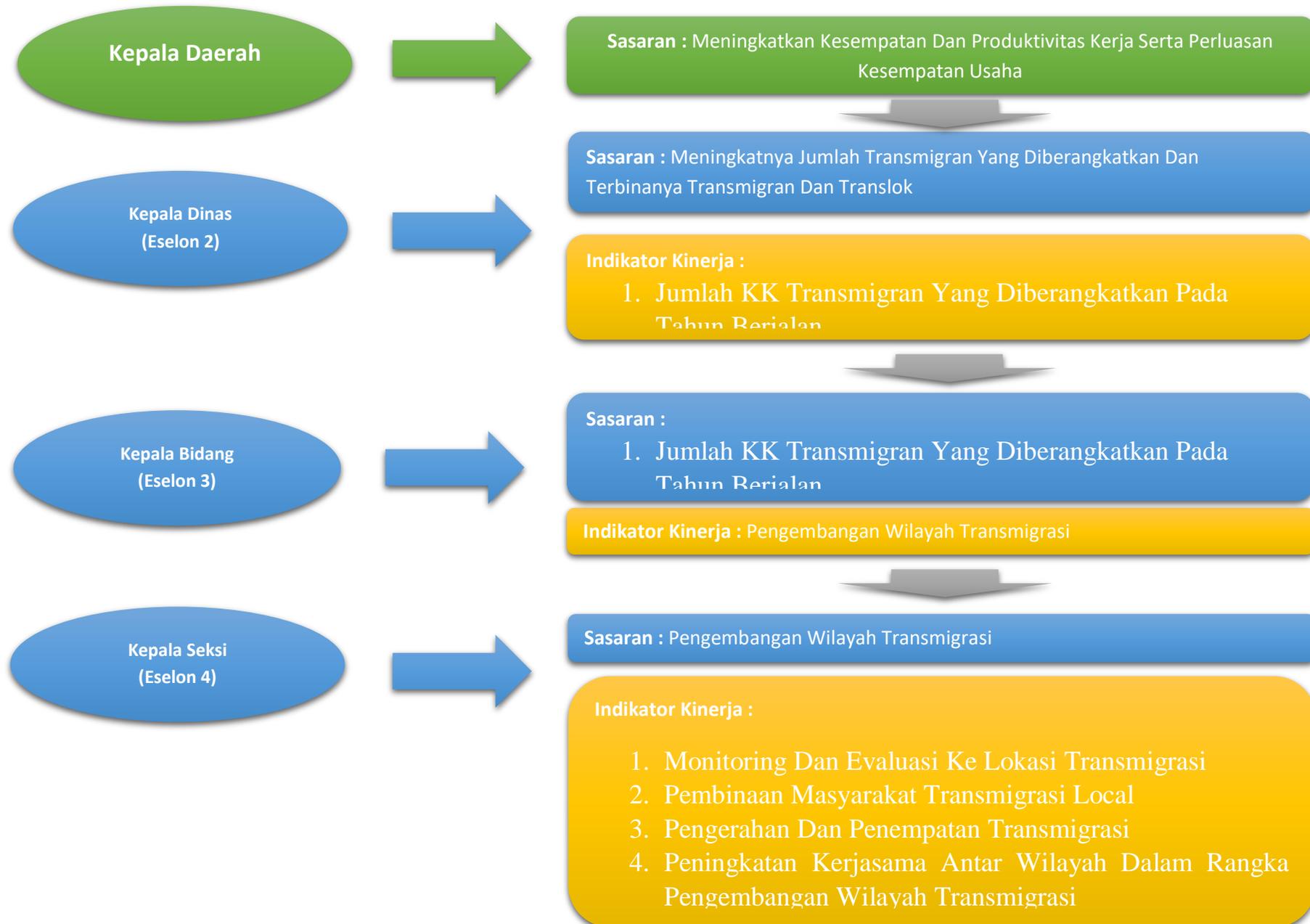
Cascading Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



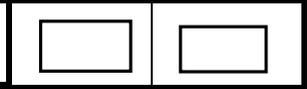
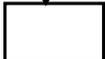
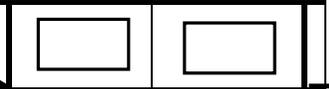
Cascading Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja



Cascading Bidang Transmigrasi



SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kasubag	Tim Penyusunan SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Kinerja					Struktur organisasi	15 menit	draft tim	
2	Membentuk tim					Draft tim	30 Menit	Tim	
3	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim	3 hari	Rencana kegiatan pengumpulan data	
4	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan					Data kinerja	1 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
7	Laporan Kasubag kepada kepala dinas terkait hasil pengumpulan data kinerja					Konsep laporan data kinerja	1 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
	Melakukan rapat intern dengan Tim					Data kinerja	30 Menit	Laporan final	
8	Hasil Pengumpulan data					Data kinerja yang telah diparaf	1 hari	Laporan yang telah di ttd	



Monitoring dan Evaluasi Internal Triwulan Rencana Aksi 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja serta melindungi hak-hak pekerja	1. Rasio penduduk yang bekerja	93.84	%	23.46	23.46	23.46	23.46	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja						
		2. Pencari Kerja yang ditempatkan	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	Kegiatan : 15. Jobfair	Jumlah peserta jobfair	80.885.000	-	-	20 prshn	-
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56.88	%	14.22	14.22	14.22	14.22	16. Pengemban gan teknologi tepat guna	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	76.030.000	-	20 org	-	-
		4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	140	Orang	35	35	35	35	17. Pemberday aan tenaga kerja mandiri (DBHCHT 2018)	Memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	323.082.000	-	-	60 org	40 org
		5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	100	Orang	25	25	25	25	18. Perluasan kesempatan kerja (DBHCHT 2018)	Jumlah tenaga kerja sementara/penganggur sementara	170.000.000	-	88 org	-	-
		6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	200	Orang	50	50	50	50	19. Pembinaan busa kerja khusus (DBHCHT 2018)	Penyedia lapangan kerja bagi para penganggur dan setengah penganggur	49.000.000	-	60 BKK	-	-
		7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100	%	25	25	25	25	20. Pembinaan pelaksana tenaga kerja Indonesia	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja Indonesia swasta melalui PPTKIS	30.000.000	-	-	-	30 org



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									swasta (PPTKIS) (DBHCHT 2018)						
									21. Pembinaan pengembangan hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan (Dewan pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, mayday) (DBHCHT 2018)	Kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	310.015.000	20 org	60 org	50 org	150 org
									Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
									Kegiatan : 1. Penyelesaian kasus hubungan industrial (DBHCHT 2018)	Terselesaikannya kasus hubungan industrial	77.017.000	100 prshn	-	-	-
									2. Pelayanan pemulangan TKI (DBHCHT 2018)	Meningkatnya pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah	40.000.000	1 Org	2 Org	1 Org	1 Org
									3. Pembinaan dan evaluasi serikat pekerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya etos kerja yang lebih baik diperusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif	87.500.000	-	100 Org	-	100 Org



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									4.Pembinaan tenaga kerja asing di perusahaan (DBHCHT 2018)	Meningkatnya ketertiban administrasi tenaga kerja asing diperusahaan yang ada diwilayah kab. Sukabumi	20.000.000	-	30 org	15 org	262 org
									5.Rapat koordinasi hubungan industrial dan syarat kerja (DBHCHT 2018)	Meningkatnya koordinasi urusan ketenagakerjaan yang kondusif diwilayah kab.sukabumi	70.000.000	-	256 org	-	-
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah								Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
									Kegiatan :						
									1.Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	Jumlah masyarakat yang dilatih	355.193.000	-	120 org	-	-
									2.Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	328.908.000	-	100 org	-	-
									3.Pembinaan Lembaga pelatihan kerja (LPK)	Jumlah pembinaan LPK	198.610.200	-	-	-	55 LPK
									4.Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (PIK Sektor) (DBHCHT 2018)	Jumlah masyarakat pedesaan yang dilatih	100.000.000	-	-	20 org	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1. Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Instiusional)	40	Orang	10	10	10	10							
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbina transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina	16.8 30	%/thn KK	4.2 7	4.2 7	4.2 9	4.2 7	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan : 1.Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi 2.Pembinaan masyarakat transmigrasi lokal 3.Pengerahan dan penempatan transmigrasi 4.Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikunjungi diluar pulau jawa Jumlah masyarakat translok yang dibina Jumlah calon transmigran yang akan dikirim ke luar pulau jawa Lokasi penjajagan daerah penerima transmigrasi	87.689.000 51.780.000 53.402.950 72.710.000	1 lokasi - 1 MoU	1 lokasi 2 Lokasi - -	- 2 Lokasi - -	- 1 Lokasi KK - -



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target				Program/Kegiatan	Indikator (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja			
					Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4				Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									5.Sosialisasi transmigrasi	Materi program ketransmigrasian yang disampaikan kepada masyarakat	36.325.000	-	50 org	50 org	50 org



Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi

Drs. H. ADE MULYADI, M.Si
NIP. 19630202 198608 1 001

